

SKRIPSI

DHANNY JAUHAR IMAN TRI PUTRA

**PENERAPAN LEMBAGA PAKSA BADAN DI
INDONESIA MELALUI PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2000**

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

**PENERAPAN LEMBAGA PAKSA BADAN DI INDONESIA
MELALUI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2000**

SKRIPSI

M I I K
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

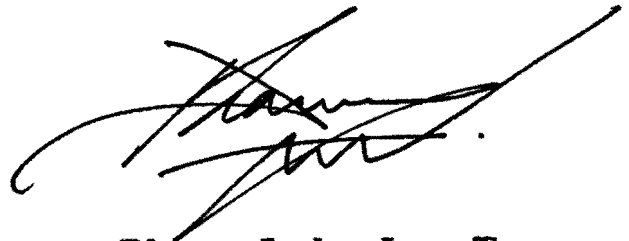
**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Sri Handajani, S.H., M.Hum.
NIP. 130 809 069

Penyusun,



Dhanny Jauhar Iman T.
NIM. 039714596


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

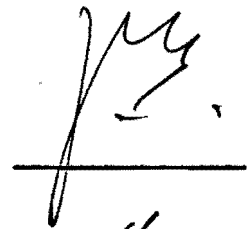
Pada tanggal 24 Januari 2001

Panitia Penguji Skripsi :

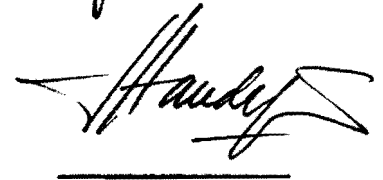
Ketua : Prof. DR. Moch. Isaeni, S.H., M.S.



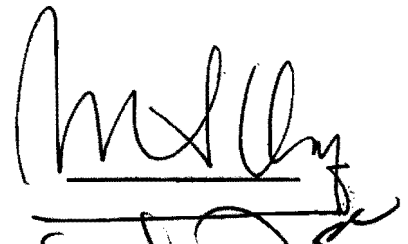
Anggota : 1. Y. Sogar Sinamora, S.H., M.Hum.



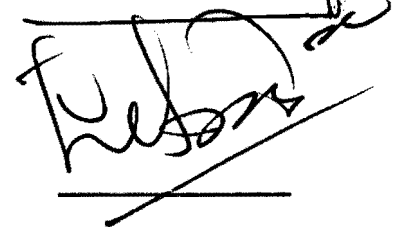
2. Sri Handajani, S.H., M.Hum.



3. Hj. Moerdiati, S.H., M.S.



4. Lisman Iskandar, S.H., M.S.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Dengan diberlakukannya kembali lembaga paksa badan di Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2000, secara hipotesis dapat diharapkan bahwa penerapan lembaga paksa badan ini akan dapat membantu mempercepat proses pemulihan (recovery) kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini sedang mengalami krisis, dimana salah satu penyebab krisis ini adalah tindakan-tindakan dari para debitur yang tidak mau mengembalikan hutang-hutangnya padahal dirinya mampu untuk melunasinya, dengan diberlakukannya lembaga paksa badan maka diharapkan tindakan-tindakan debitur tersebut dapat di eliminir atau setidaknya dapat di minimalisir.
- b. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 1 tahun 2000, yang di dalamnya mempunyai pengaturan yang lebih sesuai untuk diterapkan pada kondisi saat ini (up to date) bila dibandingkan dengan pengaturan paksa badan seperti yang terdapat di dalam HIR , dapat disimpulkan akan dapat menimbulkan dampak yang positif bagi kepastian dunia usaha dan tentunya akan lebih meningkatkan kewibawaan hukum utamanya dalam bidang perdata, selain itu dengan diterapkannya PERMA No. 1 tahun 2000 ini di harapkan proses pelaksanaan eksekusi perdata

yang selama ini sering tidak dapat dilaksanakan di karenakan objek sengketa / barang jaminan telah dialihkan kepada pihak ke tiga, dapat menjadi alternatif untuk menekan pihak yang kalah untuk mau memenuhi putusan peradilan.

2. Saran

- a. PERMA No. 1 Tahun 2000 mengenai paksa badan ini, masih perlu untuk disempurnakan lagi di karenakan di dalamnya masih banyak kelemahan-kelemahan seperti misalnya jumlah hutang minimal 1 Miliard rupiah yang menjadi batas minimal pemberlakuan paksa badan di rasa sangat diskriminatif dan juga pengaturannya tidak jelas, apakah jumlah Rp. 1 M itu merupakan murni hutang pokok ataukah hutang pokok ditambah bunga ataukah yang lainnya, tentu saja hal ini memerlukan pengaturan lebih lanjut. Selain itu kelemahan dari PERMA No. 1 Tahun 2000 adalah di dalamnya tidak mengatur bagaimana penyelesaian hutang piutang, bila setelah 3 tahun debitur tetap saja tidak mau memenuhi kewajibannya, apakah debitur itu akan dilepaskan ataukah di ambil tindakan-tindakan tertentu, PERMA No. 1 Tahun 2000, tidak mengatur lebih lanjut masalah ini. Di dalam PERMA No. 1 tahun diatur juga masalah penetapan paksa badan yang di dasarkan atas surat pengakuan hutang seperti yang diatur di dalam pasal 224 HIR, tetapi sampai saat ini belum ada suatu aturan baku / standarisasi mengenai bentuk dari surat pengakuan hutang tersebut, hal ini tentu saja berimplikasi negatif terhadap pelaksanaan eksekusi yang didasarkan atas grosse akta surat pengakuan hutang. Oleh karena itu